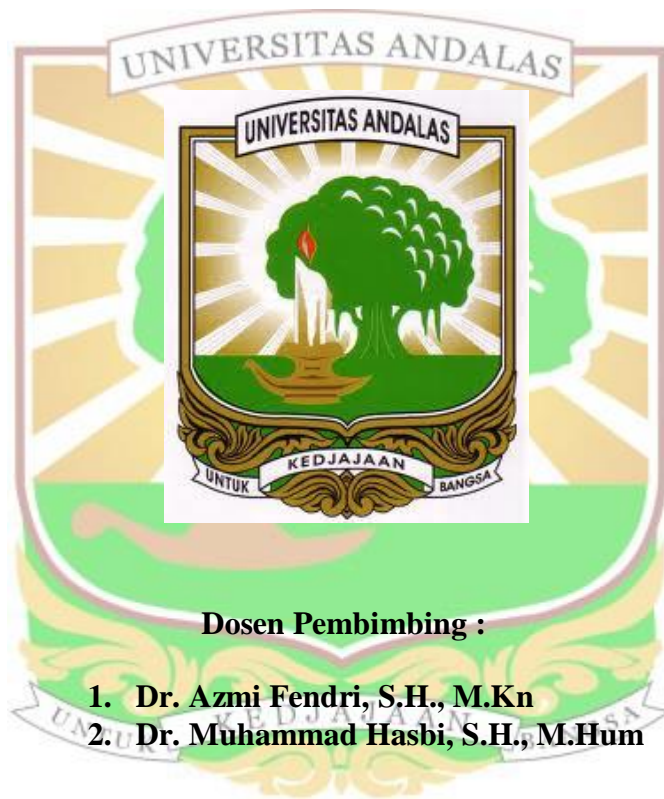


**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH YANG AKAN
MENJADI ASET PEMERINTAHDAERAH PADA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO**

TESIS

Oleh:

**FEBRI VIRGINIA
1620123063**



Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn**
- 2. Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITASANDALAS
PADANG
2020**

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH YANG AKAN MENJADI ASET PEMERINTAH DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUKOMUKO

(Febri Virginia, 2020, NRM. 1620123063, Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 156 halaman)

ABSTRAK

Paradigma baru otonomi daerah dan peningkatan tuntutan dari penyelenggaraan pemerintah daerah dituntut secara baik dalam pengelolaan barang milik daerah, seperti halnya tanah yang merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan daerah, selanjutnya diawasi dan diperiksa secara internal maupun eksternal, guna pertanggungjawaban pelaksanaannya, untuk itu perlu dilakukan pendaftarannya pada kantor Badan Pertanahan Nasional. Berkaitan dengan itu, perlu dikaji secara yuridis tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sebagai aset daerah. Pokok permasalahan yang menjadi pembahasannya adalah tentang bagaimana bentuk pengaturan hokum pendaftaran tanah aset pemerintah daerah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko dan bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah aset pemerintah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko serta bagaimana akibat hukumnya terhadap tanah aset Pemerintah Daerah Mukomuko yang tidak di daftar pada Kantor Pertanahan Nasional Mukomuko. Pendekatan masalah yang digunakan yuridis empiris dengan sumber data berupa data primer dan sekunder. Analisis terhadap data yang sudah diperoleh menggunakan analisis kualitatif sehingga dapat dideskriptifkan sesuai dengan fakta hukumnya. Dari hasil penelitian dan pembahasan dengan berpedoman pada rumusan masalah penelitian, diperoleh gambaran bahwa bentuk pengaturan hokum pendaftaran aset pemerintah daerah, disamping mempedomani Undang-undang Pokok Agrariadan ketentuan tentang pendaftaran tanah secara umum, juga mengacu pada ketentuan tentang perbendaharaan negara, peraturan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah serta pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Dalam pelaksanaan pendaftarannya, dapat dikatakan bahwa aset daerah berupa barang milik negara/daerah dalam bentuk tanah telah dilakukan pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional dengan terlebih dahulu dilakukan inventarisasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas penguasaan aset tersebut, sehingga sesuai dengan peruntukan dan pertanggungjawaban penggunaannya. Akibat hokum tidakdidaftarkannya aset, berakibat tidak adanya kepastian hukum atas hal tersebut, sehingga jaminan penggunaannya secara hukum masih lemah, bahkan dapat dikuasai atau beralih pada, sehingga pemerintah daerah dapat dirugikan.

Kata Kunci :Pendaftaran, tanah dan aset pemerintah daerah

IMPLEMENTATION OF REGIONAL LAND ASSET REGISTRATION IN NATIONAL LAND OFFICE MUKOMUKO DISTRICT

**(Febri Virginia, 2020, Master of Notarial Law Program, Faculty of Law,
Andalas University, 156 pages)**

ABSTRACT

The new paradigm of regional autonomy and increasing demands from the implementation of regional government are demanded well in the management of regional property, such as land which is part of the management of regional wealth, then supervised and inspected internally and externally, in order to carry out the implementation. office of the National Land Agency. In this regard, it is necessary to review juridically the implementation of land registration as a regional asset. The subject matter of the discussion was about the form of legal arrangements for registering local government assets at the Mukomuko District National Land Agency and how the registration of government asset land at the Mukomuko Regency National Land Agency and how the legal consequences for the land assets of the Mukomuko Regional Government were not listed on Mukomuko National Land Office. The problem approach is empirical juridical with data sources in the form of primary and secondary data. Analysis of the data that has been obtained uses qualitative analysis so that it can be described in accordance with its legal facts. From the results of the research and discussion guided by the formulation of research problems, it was obtained an illustration of the form of legal regulation of registration of regional government assets, besides being guided by the Basic Agrarian Law and provisions on general land registration, also referring to provisions on state treasury, regulations on goods management state / regional property and technical guidelines for the implementation of regional property management. In carrying out its registration, it can be said that regional assets in the form of state / regional property in the form of land have been registered with the National Land Agency by first carrying out an inventory, the purpose of which is to obtain legal certainty over the ownership of the assets, so that they are in accordance with their use and accountability. The legal consequence is not registering assets, resulting in the absence of legal certainty over this matter, so that the guarantee of its use in law is still weak, even can be controlled or switched to, so that the regional government can be harmed.

Keywords: Registration, land and assets of local government